



## Sejarah Islam dan Politik Afghanistan

Ahmad Musta'id\*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 20201021003@student.uin-suka.ac.id

\*Korespondensi

Dikirim: 02-09-2022; Diterima: 27-10-2022; Diterbitkan: 29-12-2022

**Abstract:** This research is motivated by several media that present news of conflicts that often occur and are prolonged to various in the country of Afghanistan which is predominantly inhabited by Muslims. Departing from this, the author is very interested in exploring the existence of these events. This study aims to determine the history of the development of Islam and the dynamics of Islamic politics in Afghanistan. This research uses historical approach analysis. The analysis is more directed to the history of the development of Islam and political dynamics in Afghanistan. The findings of this study are that Islam has developed in Afghanistan for a long time and the turmoil of the emergence of several events such as the civil war to the emergence of the Taliban group whose movement is very massive, the emergence of several political parties that adorn democracy in Afghanistan makes political dynamics in Afghanistan very diverse.

**Keywords:** Afghanistan; Islamic history; Islamic politics

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa media yang menyajikan berita konflik yang sering terjadi dan berkepanjangan hingga beragam di negara Afghanistan yang mayoritas dihuni oleh orang muslim. Berangkat dari hal itu, penulis sangat tertarik untuk menelusuri adanya peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan Islam dan dinamika politik Islam di Afghanistan. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan sejarah. Analisis tersebut lebih mengarah kepada sejarah perkembangan Islam dan dinamika politik di Afghanistan. Temuan dari penelitian ini adalah bahwasanya Islam telah berkembang lama di wilayah Afganistan dan gejolak munculnya beberapa peristiwa seperti perang saudara hingga munculnya kelompok Taliban yang pergerakannya sangat massif, munculnya beberapa partai politik yang menghiasi demokrasi di Afghanistan membuat dinamika politik di Afghanistan sangat beragam.

**Kata Kunci:** Afghanistan; politik Islam; sejarah Islam



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Pendahuluan

Perkembangan Islam memang tak diragukan lagi setelah terbukti mampu menaklukkan berbagai wilayah di beberapa belahan dunia, termasuk benua Asia (Wicaksono, 2020). Berkaitan dengan perkembangan Islam di Asia, dewasa ini ada satu negara yang tampaknya sangat menarik untuk diperbincangkan, yaitu Afghanistan. Sejak awal umat manusia dan sepanjang sejarah, Afghanistan telah menghadapi kekacauan dan perselisihan selama berabad-abad. Hanya dalam beberapa tahun terakhir negara ini mampu membangun kembali dari perang

destruktif. Sejarah Afghanistan adalah salah satu yang penuh dengan konflik, kesusahan, dan kerusuhan sosial tetapi tetap menawarkan narasi yang luas, menarik, dan beragam. Karena lokasi negara di sepanjang rute perdagangan penting antara Asia dan Timur Tengah, Afghanistan telah berulang kali diserbu dan ditaklukkan oleh penguasa dan pemerintah asing selama berabad-abad (Runion, 2007).

Berbagai konflik di negara Afghanistan menjadi sangat panjang. Tidak jarang efek yang dihasilkan dari konflik tersebut timbul dan tenggelam cukup beragam. Peristiwa perang saudara yang mengikuti kepergian pasukan Uni Soviet terakhir akhirnya menyebabkan munculnya Taliban (sebagian besar terdiri dari pengungsi Pashtun yang telah tinggal di Pakistan) pada tahun 1994. Tidak hanya itu, antara tahun 1996 dan 1998, Taliban secara militer mampu mengalahkan Aliansi Utara non-Muslim. Minoritas Pashtun melucuti senjata sejumlah milisi mujahidin yang bersaing lainnya, dan menguasai sekitar 80 persen negara, di mana ia memberlakukan fundamentalisme Islam pada apa yang disebut *Imarah Islam Afghanistan* (Esposito, 2002). Pasca Taliban, lambat laun Afghanistan memulai babak baru era demokrasi dengan diadakannya pemilu. Kemudian beberapa partai politik secara resmi diakui sebagai entitas yang sah dan diizinkan untuk mengatur dan berbicara di depan umum. Meningkatnya keinginan untuk bergabung dengan partai politik menunjukkan pentingnya pemilu dan merupakan fungsi dari iklim politik Afghanistan. Kontestasi debat politik seputar pemilu kemudian mendominasi sebagian besar media berita. Beberapa partai tersebut kemudian membangun kepercayaan di antara para pendukungnya dan mampu menjanjikan imbalan nyata dalam bentuk patronase di masa depan jika calon yang diusung mereka menang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik analitis. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah politik analitis lebih mampu mengungkapkan berbagai aspek proses politik. Proses politik terjadi senantiasa dalam kerangka struktural kekuasaan, seperti struktur kekuasaan atau jaringan hubungan sosial yang menghasilkan kekuasaan sosial. Dalam hubungan ini sangat relevan menelaah kehidupan sosial anantara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilainya (Kartodirdjo, 1992). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori politik Islam sebagai alat bantu analisis. Politik Islam disini merujuk pada aktivitas organisasi dan gerakan yang melakukan mobilisasi dan agitasi di bidang politik sambil menyebarkan tanda dan simbol dari tradisi Islam (Ismail, 2006). Dalam penelitian ini organisasi dan gerakan berperan sebagai aktor politik, kemudian secara agresif memanfaatkan agenda Islam. Mengenai aktor politik dalam penelitian ini nanti akan dibahas secara komprehensif dalam pembahasan seperti adanya gerakan kelompok Mujahidin pada tahun 1980-an dan Taliban selama kebangkitan awal mereka pada 1994-2001 (Riaz, 2021).

Kajian terdahulu tentang perkembangan Islam dan dinamika politik di Afghanistan belum banyak dibicarakan. Namun ada beberapa penelitian yang masih terkait dengan tema kajian, antara lain: pertama, penelitian tentang tantangan binadamai pasca konflik di Afghanistan oleh Irza Khurun'in. Fokus kajian yang dilakukan oleh Irza tentang binadamai di Afghanistan dalam kurun waktu 2002 hingga 2006 dengan menggunakan pendekatan *postwar democratic transition*. Binadamai pasca konflik di Afghanistan tidak membuahkan hasil demokrasi

(Khurun'in, 2016). Secara spesifik, tulisan Irza hanya memfokuskan kajian politik Afghanistan dengan kurun waktu 2002 hingga 2006. Di dalam penelitian ini tidak memuat dinamika politik Afghanistan secara keseluruhan dan tidak memuat tentang perkembangan Islam di Afghanistan.

Kedua, penelitian tentang kebijakan militer pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi kelompok Taliban di Afghanistan pada kepemimpinan Barack Obama periode 2009-2012 oleh Siti Hardiyanti. Fokus penelitian Hardiyanti menyoroti persekutuan antara Taliban dengan Al-Qaeda. Karena pimpinan Taliban melindungi Osama Bin Laden dari buruan Amerika Serikat, sehingga memicu militer Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke wilayah Afghanistan untuk menangkap Pimpinan Taliban sekaligus menyerang jaringannya dengan menggunakan kebijakan militer *Smart Power* yang kemudian berhasil menewaskan 508 anggota Taliban beserta pimpinan Al-Qaeda Osama Bin Laden (Hardiyanti, 2018). Secara keseluruhan penelitian ini hanya terfokus pada kajian politik pada kurun waktu 2009 hingga 2019 dan tidak memuat perkembangan Islam dan politik secara kronologis.

Penelitian selanjutnya adalah mengenai kepemimpinan Afghanistan di bawah Taliban. Di dalam penelitian tersebut memuat tentang kondisi Afghanistan sebelum Taliban, ideologi yang dibawa oleh Taliban, serta keadaan sosial ekonomi Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Secara garis besar penelitian ini sebagian membahas tentang keadaan dinamika politik Afghanistan mulai dari periode sebelum Taliban hingga di bawah rezim Taliban (Nafisah, 2019). Akan tetapi pembahasan mengenai awal perkembangan Islam di Afghanistan dan dinamika politik pasca pemerintah Taliban tidak di bahas dalam tulisan ini.

Afghanistan yang memiliki sejarah yang cukup panjang mulai dari era datangnya Islam ke Afghanistan, era Afghanistan pra modern hingga dinamika politik mulai dari bentuk kerajaan hingga republik antara lain seperti munculnya kekaisaran dan dinasti, adanya dominasi Uni Soviet, munculnya Perang Saudara, munculnya Taliban dan ideologi yang diusung serta perkembangan politik Afghanistan pasca kehancuran Taliban yang menjadi awal mula munculnya demokrasi di Afghanistan. Beberapa penelitian terdahulu dan literatur lain belum banyak membicarakan tentang perkembangan Islam dan dinamika politik di Afghanistan.

Atas dasar itulah kemudian penelitian dengan tema ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan berkaitan dengan awal berkembangnya Islam dan dinamika politik di Afghanistan mencakup adanya perang saudara, munculnya Taliban, munculnya partai politik dan kepemimpinan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini berkenaan dengan penelitian sejarah Politik Islam dengan berpedoman pada metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Sulasman, 2014). Tahapan pertama yaitu heuristik (pengumpulan sumber). Pada tahap ini, penulis menghimpun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan perkembangan Islam dan politik di Afghanistan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku "*The Beginnings of Islam in Afghanistan: Conquest, Aculturation, and Islamization*" karya Arezou Azad dan "*Country Profile: Afghanistan*" karya Library of Congress. Selain itu, penulis juga

menggunakan sumber sekunder sebagai pendukung dari adanya sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel, buku, dan jurnal yang membahas tentang Islam dan Politik Afghanistan. Tahapan kedua yaitu verifikasi (kritik sumber). Pada tahapan ini, penulis menyeleksi, menguji kredibilitas sumber yang telah diperoleh agar menjadi sebuah fakta sejarah. Tahapan ketiga yaitu interpretasi. Pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran untuk menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi. Tahapan terakhir yaitu historiografi (penulisan). Pada tahapan ini penulis menyajikan hasil sintesis yang diperoleh (Daliman, 2018). Berdasarkan dari metode dan langkah tersebut akan didapat pembahasan seperti di bawah ini.

## Hasil Penelitian

### Perkembangan Islam di Afghanistan

Ditinjau dari letak geografis, Afghanistan terletak di Asia Tengah, utara dan barat Pakistan, timur Iran, dan selatan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Koridor Wakhan yang sempit memanjang dari timur laut Afghanistan hingga bertemu dengan China (Congress, 2008). Bangsa ini berasal dari keturunan berbagai etnik seperti kelompok etnis utama Pashtun 42 %, Tajik 27 %, Hazara 9 %, Uzbekistan 9 %, Aimak (kelompok nomaden berbahasa Persia), 4 %, Turkmenistan, 3 %, dan Baloch, 2 %. Kelompok nomaden terbesar yang tersisa adalah Kuchis, kelompok Pashtun yang populasinya telah menyusut menjadi sekitar 1,5 juta sejak 1979. Pashtun adalah kelompok etnis utama di selatan dan timur, Tajik di timur laut. Kelompok dominan di Afghanistan utara-tengah adalah Hazara, Tajik, dan Uzbek (Congress, 2008).

Hampir seluruh penduduk Afghanistan adalah Muslim. Antara 80 dan 85 persen Muslim adalah menganut Sunni dan 15 hingga 19 persen menganut Syiah. Minoritas Syiah secara ekonomi kurang beruntung dan sering mengalami diskriminasi. Sejumlah kecil orang Hindu dan Sikh tinggal di pusat kota. Sebuah populasi Yahudi yang berjumlah 5.000 pada tahun 1948 telah meninggalkan Afghanistan seluruhnya pada tahun 2000 (Congress, 2008).

Islam pertama kali diperkenalkan ke wilayah yang saat ini disebut sebagai Afghanistan melalui penaklukan para khalifah Umayyah pada 650 M dan suksesor Abbasiyah di 700-an. Sebelum pemerintahan Muslim, tiga dari empat wilayah Afghanistan yakni Balkh, Herat, dan Sistan terintegrasi dalam orbit Sasania. Balkh dan Herat milik Khurasan, yang merupakan salah satu dari empat provinsi Sasania yang diperintah dari Merv oleh seorang *ispahbadh*, atau jenderal Sasania. Secara efektif, hal ini berarti bahwa jejak Sasanian di Balkh dan Herat adalah ringan. Secara praktis, hal ini diartikan ke dalam keterlibatan yang difokuskan pada penetapan pajak dan pemolisian perbatasan dengan domain Hephthalite di Asia Tengah dan Afghanistan timur dan selatan, dan dengan domain Kekaisaran T'ang Cina. Dalam istilah ekonomi, Balkh dan Herat juga berfungsi sebagai kota mint Sasanian. Jejak Sasanian yang ringan ini dapat ditunjukkan dengan mudah di wilayah Bactra (yang di-Arabkan menjadi *Balkh*). Catatan penaklukan sering menonjol karena kehadiran terbatas mesin administrasi dan militer Sasania. Pada tahun 705, Jenderal Umayyah yang memimpin penaklukan terakhir Balkh, Qutayba ibn Muslim (w. 715 atau 716), bertemu dengan *ispahbadh* Balkh dan beberapa pejabat lokal. Pada 708–9, *ispahbadh* adalah salah satu penguasa lokal yang kepadanya pemberontak Hephthalite

Nizak Tarkhan menulis ketika dia mencoba untuk bersatu melawan Qutayba, aristokrasi lokal Tukharistan (subregion, utara Hindu Kush, di mana Balkh berada ibukota) (Azad, n.d.).

Selama berabad-abad berikutnya, kota Balkh muncul sebagai pusat penting dalam keilmuan Islam. Namun, pengikut Buddha, Hindu, dan kultus lokal tetap menjadi populasi mayoritas di banyak wilayah Afghanistan. Setidaknya sampai akhir abad kesembilan, ketika penguasa Muslim Saffarid di Sistan menguasai Bamiyan Buddha dan Hindu-Shahi Kabul. Islamisasi penuh terjadi antara abad kesepuluh dan kedua belas melalui upaya dinasti-dinasti Persia Ghaznawi dan Ghurid. Berbasis di pegunungan tinggi Afghanistan tengah, mereka melindungi lembaga-lembaga keagamaan Muslim dan melalui penaklukan selatan, mereka juga mendorong budaya *Perso-Islam* jauh ke dalam anak benua India. Masjid dan madrasah yang elegan dibangun di kota-kota seperti Firuzkuh dan Lashkargah, sementara Ghazna dan Herat mengeksport Sufi dan *'ulama* ke India dan Persia. Banyak karya awal yang paling penting dari puisi dan prosa religius Persia yang dikomposisikan di kota-kota ini oleh orang-orang seperti Hakim Sana'i, 'Abdullah Ansari, dan al-Hujwiri. Di daerah yang lebih terpencil seperti Badakhshan, Islam Isma'ili menemukan perlindungan, sedangkan kelompok pedesaan dan nomaden mengembangkan Islam lokal mereka sendiri. Setelah penghancuran kota yang meluas dari penaklukan Mongol, antara 1370 dan 1507 Kekaisaran Timurid melihat Herat muncul sebagai salah satu pusat budaya terbesar di seluruh dunia Islam (Azad, n.d.). Hingga pada abad ke-10, Islam di Afghanistan sudah menjadi dominasi bahkan Islam menjadi agama negara yang dianut oleh mayoritas penduduk Afghanistan. Adapun muslim di Afghanistan banyak menganut mazhab Hanafi atau termasuk sekte Sunni (Supriyadi, 2008).

## **Dinamika Politik di Afghanistan**

### **1. Perang Saudara dan Taliban**

Afghanistan telah berperang sejak 1979, ketika Uni Soviet menyerbu dan menduduki Afghanistan. Saat pasukan Uni Soviet mundur pada tahun 1989, para mujahidin; faksi-faksi yang memaksa mundur justru mereka berbalik satu sama lain dan menjerumuskan Afghanistan ke dalam perang saudara (Jackson & Weigand, 2019). Perjanjian 1988 tidak menyelesaikan perbedaan antara pemerintah dan mujahidin, dan pada tahun 1992 Afghanistan mengalami perang saudara yang semakin merusak ekonomi. Di antara para pemimpin faksi yang bertikai adalah Ahmad Shah Massoud, seorang etnis Tajik; Gulbuddin Hekmatyar, seorang Pashtun; dan Abdul Rashid Dostum, seorang Uzbekistan. Meskipun beberapa aliansi sementara, perjuangan di antara kelompok-kelompok bersenjata berlanjut sampai satu kelompok fundamentalis Islam yang dikenal dengan Taliban (Congress, 2008).

Kelompok Taliban berasal dari Bahasa Arab *Thalib* yang berarti pencari ilmu dan semua Taliban adalah pengungsi di Pakistan, dimana mereka mendapatkan pendidikan agama di berbagai madrasah di provinsi Balochistan dan Khyber Pukhtunkhwa (Khan, 2022). Kelompok Taliban dibentuk oleh Mullah Muhammad Umar pada September 1994 di Kandahar, Afghanistan Selatan. Kebanyakan anggotanya berasal dari etnis Pashtun (Amal, 2004). Taliban pertama kali muncul sebagai kelompok pemberontak di tengah perang saudara Afghanistan pada tahun 1994 (Ibrahimi, 2017). Sebagian besar Taliban adalah lulusan madrasah yang

tumbuh dan bersosialisasi dalam lingkungan keagamaan yang murni konservatif (Akhtar, 2008). Gerakan ini dipimpin oleh Pashun Afghanistan yang dilatih di madrasah Deoband di Pakistan. Akar ideologinya terletak disana, dan para pemimpin Afghanistannya memiliki hubungan dekat dengan partai-partai keagamaan di Pakistan. Madrasah telah berkembang pesat di Pakistan di bawah Zia al Haq, kemudian menarik sejumlah besar anak laki-laki pengungsi Afghanistan dengan menawarkan kamar dan makan gratis bersama dengan pendidikan (Barfield, 2010). Secara historis, Taliban pertama kali muncul sebagai kelompok yang terdiri dari 30 siswa madrasah sebagai reaksi terhadap seorang panglima perang lokal yang telah menculik dan berulang kali memperkosa dua gadis remaja. Pada bulan Maret 1994, 30 Talib atau Taliban menyerang kamp panglima perang dengan misi membebaskan gadis-gadis dan menggantung komandan dari laras tank (Ibrahimi, 2017).

Selain itu, Taliban juga memiliki misi untuk memperjuangkan revolusi Islam, dan mendeklarasi misinya mengembalikan perdamaian, melucuti persenjataan masyarakat, menerapkan syariat Islam, serta mempertahankan integritas dan karakter Islam Afghanistan. Milisi yang dibentuk sebagian besar berasal dari veteran perang yang berjuang menentang Uni Soviet. Sementara brigade elit Taliban dilatih di kamp latihan Osama bin Laden. Itulah yang menjadi sebab bahwa Taliban sangat tergantung dan loyal kepada Osama bin Laden (Amal, 2004).

Selama pemerintahannya, Taliban memiliki kebijakan yang cukup ketat yang berdasar pada interpretasi Islam yang konservatif dan kaku (Fanani, 2013). Untuk menjalankan kebijakan yang ketat dan eksterm, maka dibentuklah *Departemen Amar Makruf Nahi Munkar* yang dipimpin oleh Mullah Qalam al-Din. Sebagai upaya dalam penegakan tersebut, maka dibentuk pula Polisi Keagamaan yang bertugas mengawasi penegakan syariat. Polisi Keagamaan Taliban merupakan organisasi paling ditakuti di dalam milisi. Mereka biasanya melakukan kegiatan patroli di kota-kota besar Afghanistan dengan mengenakan cambuk dan senapan otomatis di tangan, serta menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tak jarang secara brutal. Mereka melakukan razia dengan mendatangi rumah-rumah untuk menemukan bukti keterlibatan seseorang dengan rezim sebelumnya, atau mencari bukti pelanggaran terhadap syariat Taliban (Amal, 2004).

Secara eksternal pembentukan Taliban merupakan produk dari regional, khususnya ambisi regional Pakistan. Tujuan utama Pakistan mendukung Taliban adalah untuk menciptakan sebuah rezim di Kabul yang akan menguntungkan Islamabad dan untuk membuka sebuah blok ekonomi yang meluas hingga Asia Tengah. Memiliki rezim yang menguntungkan di Kabul akan memberikan kedalaman strategis Pakistan dan pembukaan rute perdagangan akan meningkatkan ekonomi Pakistan serta memberikan bobot strategis yang lebih besar (Ibrahimi, 2017).

Kemudian Taliban menguasai sebagian besar negara pada tahun 1996 (Congress, 2008). Kelompok ini menguasai 12 dari 31 provinsi Afghanistan. Setelah berhasil dalam pencapaian, Taliban kemudian mengorganisir pertemuan sekitar 1200 ulama di Kandahar dari 20 Maret hingga 4 April 1996. Pemimpin Taliban, Mullah Mohammad Omer, dalam pertemuan ini

didapuk sebagai *Amir al-Moemenin* (seorang pemimpin politik yang memiliki otoritas yang sah secara agama atas orang-orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh para pengikutnya (Ibrahimi, 2017).

Ketika Taliban semakin dekat dengan kekuasaan pada tahun 1996, diplomasi AS menjadi lebih aktif. Washington berharap untuk meningkatkan pengaruhnya atas pengembangan dan transportasi sumber daya energi Kaspia, dan di samping itu, ada harapan bahwa Taliban mungkin dapat menekan perdagangan narkoba Afghanistan dan mewujudkan Afghanistan yang damai dan stabil setelah satu dekade dan setengah dari perselisihan. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat mengambil beberapa langkah kecil untuk melibatkan otoritas baru Taliban di Afghanistan. Tindakan ini tampaknya menempatkan Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan Pakistan sebagai pendukung Talib melawan musuh gerakan di India, Iran, dan Rusia. Dari sudut pandang Taliban, ada harapan bahwa sikap Amerika ini pada akhirnya akan mengarah pada pengakuan diplomatik AS (Rashid, 2001).

Taliban menggunakan interpretasi ekstremis Islam untuk menegaskan kontrol represif masyarakat. Perekonomian tetap hancur, dan sebagian besar layanan pemerintah berhenti (Congress, 2008). Kehadiran Bin Laden di Afghanistan menjadi sumber utama konflik antara Taliban dan masyarakat internasional (Barfield, 2010). Taliban memberikan organisasi teroris Arab al Qaeda hak untuk menggunakan Afghanistan sebagai pangkalan. Saat al Qaeda melakukan serangkaian aksi teroris internasional yang berpuncak pada serangan di Amerika Serikat pada 11 September 2001, Taliban menolak tekanan internasional untuk menyerahkan pemimpin al Qaeda Osama bin Laden (Congress, 2008). Arab Saudi dan Amerika Serikat sama-sama ingin mengekstradisi Bin Laden atas berbagai serangan teroris yang dilakukan al Qaeda agar diusir dari negara itu. Akan tetapi, Mullah Omar justru tidak mau melakukannya (Barfield, 2010). Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Afghanistan pada musim gugur 2001, pemerintah Taliban runtuh, tetapi para pemimpin Taliban dan al Qaeda lolos. Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin Amerika Serikat memulai pendudukan yang masih berlangsung pada tahun 2008 (Congress, 2008).

Sementara itu, kebangkitan Taliban semakin intensif. Kegiatan teroris di daerah di luar kendali pemerintah, khususnya provinsi tenggara. Pada pertengahan 2006, pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membalikkan serangan Taliban yang ditujukan ke Kandahar. Namun, mulai tahun 2007 Taliban memanfaatkan tempat berlindung yang aman di Pakistan yang berdekatan untuk secara bertahap memulihkan dan memperluas kendalinya di Afghanistan. Pada awal 2008, ia menguasai sekitar 10 persen negara sementara pemerintah hanya menguasai sekitar 30 persen. Suku-suku lokal menguasai wilayah yang tersisa. Terlepas dari upaya bantuan AS untuk mengurangi penanaman *bunga poppy* untuk produksi narkotika, pada tahun 2007 dan 2008 tanaman itu menyumbang persentase peningkatan ekonomi Afghanistan dan merupakan dukungan utama bagi Taliban. Pada pertengahan tahun 2008, Konferensi Internasional baru untuk mendukung Afghanistan menegaskan kembali komitmen internasional terhadap stabilitas ekonomi dan politik negara itu tetapi menuntut peningkatan koordinasi bantuan dan pengurangan korupsi. Sementara itu, kesulitan ekonomi yang meluas semakin melemahkan dukungan pemerintah Karzai di antara penduduk (Congress, 2008).

## 2. Munculnya Partai Politik dan Kepemimpinan

Partai politik di Afghanistan berawal dari mobilisasi gerakan *mashrutiat* (konstitusionalis) pada awal 1900-an, meskipun perkembangan ke dalam organisasi saat ini tidak langsung atau linier (Ruttig, 2013). Kelompok pemuda yang tidak puas muncul sebagai oposisi terhadap pemerintahan Amanullah Khan (1919-1929) dan pemerintahan konstitusional yang berurutan. Kelompok-kelompok ini termasuk *Afghanan-e Jawan*, atau Pemuda Afghanistan, yang mendorong reformasi konstitusi dan mencontoh gerakan Turki Muda di Turki kontemporer (Dupree, 1980). Mereka menilai reformasi Amanullah terlalu radikal dan tidak menyukai kecenderungan pro-Turki dari raja baru. Pada tahun 1928, Amanullah mencoba mengubah *Jawanan* menjadi organisasi politik yang lebih terstruktur, *Istiqlal wa Tajadud* (Kemerdekaan dan Modernisasi) untuk mendapatkan dukungan massa bagi reformasinya. Akan tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil (Giustozzi, 2013). Jauh kemudian, pada 1940-an, gerakan *Wesh Dzalmian* memimpin oposisi yang lebih umum terhadap elit penguasa (Dupree, 1980).

Pada era kepemimpinan Daoud Khan pada 1950-an, kelompok-kelompok oposisi dipaksa turun ke bawah tanah tetapi terus bertemu untuk membahas dan mempublikasikan pandangan alternatif tentang sistem politik Afghanistan. Selama 1960-an, baik Islamis maupun kiri kelompok-kelompok berkembang di kampus-kampus universitas di seluruh negeri, banyak di antaranya baru didirikan di bawah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan tinggi. Kelompok-kelompok ini juga didorong oleh konstitusi baru pada tahun 1964, yang menjanjikan ratifikasi UU Partai untuk memberikan hak kepada partai politik untuk eksis sebagai organisasi yang diakui secara resmi. Mereka malah terpinggirkan, pertama ketika Mohammad Zahir Shah menolak menandatangani undang-undang tersebut setelah parlemen meratifikasinya dan lagi pada tahun 1973 setelah kudeta Daoud dan pemusnahan sistematis kelompok mana pun yang menentang pemerintahannya (Larson, Anna; Coburn, 2014).

Dari pengasingan mereka di Pakistan dan Iran, *ulama organisasi* keagamaan dan kelompok politik yang dikelola yang muncul dari gerakan mahasiswa di universitas-universitas dikonsolidasikan sebagai milisi bersenjata dan dimobilisasi melawan pasukan Soviet yang menginvasi Afghanistan pada 1979. Satu dekade kemudian, ketika kelompok-kelompok ini dengan dukungan internasional yang cukup besar dan masukan dari pemain regional, terutama Pakistan telah mengamankan kepergian pasukan Rusia, mereka akan mendapatkan reputasi untuk kebrutalan dan kelebihan militer selama perang saudara yang merusak. Kekalahan mereka oleh Taliban menyebabkan periode stabilitas politik yang suram berdasarkan visi pemerintahan yang kaku dan teokratis yang tidak menyisakan ruang bagi pluralisme partai. Baru pada tahun 2001 dan konstitusi baru yang demokratis, partai-partai muncul kembali (Larson, 2015).

Bahkan pada titik ini, bagaimanapun, partai politik memiliki sedikit ruang politik. Pada tahun 2003, mereka secara resmi diakui sebagai entitas yang sah dan diizinkan untuk mengatur dan berbicara di depan umum. Namun, undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan mereka tanpa mengacu pada peran politik bersama asosiasi sosial dan organisasi masyarakat

sipil (Reynolds & Wilder, 2004). Undang-Undang Partai Politik tahun 2003 mengharuskan semua partai politik terdaftar di Kementerian Kehakiman dan menjalankan ajaran Islam. Pada tahun 2007 sekitar 82 partai telah memperoleh pengakuan tersebut. Karena identifikasi partai tidak diperbolehkan untuk calon dalam pemilu 2005, koalisi berbasis partai tidak dapat berfungsi di parlemen. Sebagian besar pengelompokan politik didasarkan pada aliansi yang terbentuk selama perjuangan militer 1979–2002. Aliansi Utara adalah konfederasi longgar yang berpengaruh dari beberapa kelompok Hazara, Tajik, dan Uzbekistan yang berperang melawan Taliban. Fraksi aliansi adalah kekuatan kunci di parlemen yang dipilih pada tahun 2005. Pada tahun 2008 partai individu terbesar adalah Partai Islam Afghanistan, Partai Kongres Nasional Afghanistan (diwakili dalam pemilihan presiden oleh pemenang tempat kelima Abdul Latif Pedram), Gerakan Islam Nasional Afghanistan (sebuah partai Uzbekistan, diwakili dalam pemilihan oleh peraih peringkat keempat Abdul Rashid Dostum), Gerakan Nasional Afghanistan (koalisi 11 partai yang juga dikenal sebagai Partai Nasionalis Afghanistan), Masyarakat Islam Afghanistan, Partai Persatuan Islam, dan Front Persatuan Nasional (didirikan oleh anggota Koalisi Utara dan pemimpin lainnya setelah pemilu 2005). Anggota Front Nasional Persatuan Yonus Qanooni, pembicara Wolesi Jirga, telah menjadi suara utama oposisi terhadap pemerintah Karzai dan dianggap sebagai calon yang mungkin dalam pemilihan presiden 2009. Presiden Karzai telah menolak untuk membentuk sebuah partai untuk memajukan program-programnya. Parlemen pertama menampilkan pembagian yang luas antara para pemimpin konflik militer sebelumnya dan "modernis" muda yang menekankan pembangunan masa depan negara. Pembagian kekuasaan politik penting lainnya adalah antara selatan yang didominasi Pashtun dan utara yang didominasi Tajik dan Uzbek (Congress, 2008).

Sistem pemilu yang dipilih untuk pemilihan presiden dan legislatif 2004-2005 adalah sistem *Single Non-Transferable Vote* (SNTV). Sistem ini tidak mengharuskan calon menjadi anggota partai. Pada hari-hari awal, tidak ada ruang yang dialokasikan di kertas suara bagi para kandidat untuk menyatakan afiliasi partai (Reynolds & Wilder, 2004). Pemilihan sistem SNTV oleh aktor Afghanistan dan internasional adalah pilihan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mengecualikan partai, sebagian karena reputasi kekerasan yang diperoleh partai-partai pada tahun-tahun perang dan sebagian untuk menghalangi oposisi terhadap pemerintah baru. Sejak itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengubah sistem pemilihan tetapi tidak berhasil, mengingat bias kuat Presiden Hamid Karzai terhadap partai politik (Larson, 2015). Meski demikian, Hamid Karzai terbukti menjadi pemimpin yang cukup efisien, setidaknya di tahun-tahun awal kepresidenannya. Dia memprakarsai dan merealisasikan beberapa proyek sosial, ekonomi, publik, politik, dan peradilan yang sangat penting. Zalmay Khalizad, perwakilan khusus presiden AS untuk Duta Besar AS untuk Afghanistan pada tahun 2003-2005 telah menunjukkan bahwa negaranya pertama-tama mengandalkan "tokoh politik yang kuat sambil membantu orang Afghanistan untuk membangun sistem politik yang membutuhkan kekuatan dengan seperangkat aturan baru (Ergashev, 2011).

Pada tahun 2009, Undang-Undang Kepartaian baru diperkenalkan, yang mewajibkan semua pihak untuk mendaftar ulang dan memasukkan persyaratan baru yang bertujuan untuk mengurangi jumlah mereka. Alih-alih harus menunjukkan tujuh ratus tanda tangan anggota,

mereka diharuskan mengumpulkan sepuluh ribu dari seluruh provinsi Afghanistan. Kondisi ini memang mengurangi jumlah partai yang terdaftar secara resmi, dari lebih dari seratus menjadi enam puluh tiga, tetapi tampaknya tidak banyak membantu mengkonsolidasikan basis dukungan partai atau melembagakan praktik partai (Larson, 2015). Pada rapat umum kampanye lokal, para elit klien menggunakan gambar pemimpin faksi etnis masa lalu mereka untuk menarik basis etno regional mereka dan membenarkan keputusan mereka untuk bersekutu dengan kandidat tertentu. Sebagai contoh, *Wahdat Tanzim*, untuk membenarkan keputusannya untuk bersekutu dengan Karzai. Persekutuan dengan Karzai dipandang memberikan kesetaraan dan persaudaraan. Selain itu, klien fraksi suku daerah Mohammad Mohaqeq (mantan Menteri Perencanaan dan Pemimpin Partai Wahdat Mardomi), Karim Khalili (wakil presiden kedua Karzai dan pemimpin Partai Islam Wahdat), Jendral Rashid Dostum (pemimpin Partai Junbish Islami), Ismail Khan (mantan gubernur provinsi Hirat) merekrut elit di tingkat desa, kabupaten, dan wilayah di basis selatan yang tidak memiliki partai politik, dan mengandalkan kekerabatan suku (Sharan & Heathershaw, 2011).

Pada perkembangan selanjutnya, fenomena kaum muda yang semakin melihat partai sebagai kendaraan untuk promosi diri dan karir politik di Afghanistan juga telah didokumentasikan di tempat lain, partai-partai yang dibentuk kembali khususnya telah mengambil peranan sebagai pelindung, menyediakan fasilitas seperti asrama universitas, dan layanan dasar bagi mahasiswa dengan imbalan dukungan politik. Kaum muda naik peringkat dengan relatif cepat berdasarkan kemampuan bahasa Inggris, komputer, dan media sosial mereka. Para pihak semakin menyadari nilai kontribusi ini dan ingin memberikan dampak yang lebih besar kepada kaum muda (Larson, 2015).

Pada tahun 2013, usulan reformasi pemilu, termasuk ketentuan sistem pemilu campuran yang menggabungkan SNTV dengan daftar partai, diajukan ke parlemen oleh Dewan Kerjasama Partai Politik dan Koalisi dan Organisasi Masyarakat Sipil. Namun, ini akhirnya ditolak. Tidak mengherankan, mengingat bahwa perubahan pada sistem pemilu mungkin telah membahayakan peluang terpilihnya kembali anggota parlemen (anggota parlemen) tetap (Larson, 2015).

Menjelang pemilu 2014, kaum muda di kedua belas partai yang diteliti tampaknya bergabung dengan partai dalam jumlah yang lebih besar. Peningkatan ini tidak selalu menunjukkan berubah tren yang hanya bisa menjadi upaya untuk menyelaraskan dengan tim pemenang. Kaum muda memilih dengan hati-hati dan sering kali ingin membicarakan alasan di balik pilihan mereka. Tentu saja pemuda tidak dapat disamakan dengan mudah ke dalam satu kategori yang dianggap memiliki kecenderungan politik liberal. Namun, yang bersaing dengan partai politik terdaftar untuk keanggotaan pemuda adalah gerakan radikal baru, seperti *Jamiyat-e Islah* dan *Hizbut Tahrir*. Organisasi-organisasi ini yang didirikan di Afghanistan hanya dalam lima tahun terakhir mempromosikan sikap politik yang konservatif, anti-Barat, anti-demokrasi dan menarik sejumlah besar pemuda perkotaan yang berpendidikan. Dalam menyediakan alternatif pemberontakan perkotaan yang umumnya non-kekerasan, kelompok-kelompok semacam itu menarik anggotanya dengan menyediakan akses Internet dan pelajaran tentang literasi komputer. Selain itu, mengingat popularitas mereka yang semakin meningkat, mereka

dapat memobilisasi massa dalam jumlah besar dengan relatif cepat. Demonstrasi *Jamiyat-e Islah* baru-baru ini di Herat, dilaporkan dihadiri oleh sebanyak empat puluh ribu anak muda (Larson, 2015).

Meningkatnya keinginan untuk bergabung dengan partai politik menunjukkan pentingnya pemilu 2014 dan merupakan fungsi dari iklim politik Afghanistan. Debat politik seputar pemilu mendominasi sebagian besar media berita. Dari dua belas partai yang diteliti, sembilan mengambil keuntungan dari situasi ini, memilih calon presiden mereka dengan cepat, dan memberi pemilih afiliasi yang jelas setidaknya sebulan sebelum putaran pertama pemilihan. Dengan demikian, partai-partai ini membangun kepercayaan di antara para pendukungnya dan mampu menjanjikan imbalan nyata dalam bentuk patronase di masa depan jika calonnya menang (Larson, 2015).

Kaum wanita, khususnya wanita muda, juga tampak lebih tertarik untuk bergabung dengan partai. Perubahan ini mungkin sebagian karena partai sekarang menawarkan lebih banyak kepada perempuan, jika tidak secara substantif (seperti kontribusi untuk pengambilan keputusan internal) maka setidaknya secara simbolis (dukungan untuk kampanye dewan provinsi). Namun, dukungan untuk kampanye tidak menjamin kesetiaan partai, terutama mengingat banyak yang memilih untuk tidak secara resmi menyatakan afiliasi partai dalam surat suara. Misalnya, hanya tiga puluh enam dari 308 kandidat perempuan dalam pemilihan dewan provinsi pada tahun 2014 yang secara resmi berafiliasi (Larson, 2015).

Akan tetapi, akibat dari penarikan cepat sebagian besar pasukan AS pada tahun 2014, pemerintah pusat terus kehilangan kemampuan untuk memerintah di luar pusat populasi utama Afghanistan; memberikan langkah-langkah yang terbatas untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi narkotika; mengontrol kekuasaan dan panglima perang; menyelenggarakan program di lapangan; dan menyediakan layanan utama seperti kepolisian, pendidikan, perawatan medis, dan memastikan hak-hak perempuan. Kepergian Karzai pada tahun 2014 menyebabkan pemilihan di mana dua tokoh; Mohammad Ashraf Ghani dan Abdullah, keduanya mengklaim telah terpilih sebagai Presiden dalam pemilihan yang meragukan dan sebagian dicurangi. Mereka hanya setuju untuk bekerja sama setelah penyelesaian negosiasi AS antara kedua pemimpin menentukan bahwa Ghani akan menjadi presiden dan Abdullah Abdullah akan setara dengan CEO. Sistem ini telah berulang kali mendekati keruntuhan pada tahun-tahun berikutnya. Loyalitas dalam faksi Ghani dan Abdullah Abdullah yang terpisah telah terbukti tidak pasti, dan kompromi atas kendali wilayah, dana pemerintah, atau janji politik besar yang tidak mendapat dukungan dari pialang kekuasaan luar telah gagal atau paling rapuh. Badan legislatif Afghanistan hanya memiliki sedikit kendali yang berarti atas dana negara, dan sedikit keefektifan yang nyata (Cordesman & Hwang, 2020).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Islam sudah lama masuk ke wilayah Afghanistan pada masa penaklukan para khalifah Umayyah pada 650 M dan suksesor Abbasiyah di 700-an. Adanya Islamisasi di Afghanistan, Islam kemudian menjadi sebuah mayoritas agama penduduk Afghanistan dengan masing-masing antara 80-85%

Muslim Afghanistan adalah menganut Sunni dan 15% hingga 19 % menganut Syiah. Dinamika politik di negara Afghanistan memiliki perjalanan yang cukup panjang dan krusial. Pada mulanya, pemerintahan Afghanistan berbentuk monarki absolut hingga pada perkembangan selanjutnya terjadi beberapa kudeta yang merubah sistem pemerintahan Afghanistan. Terlebih, saat munculnya berbagai partai politik dan beberapa gerakan telah memberikan pengaruh terhadap percaturan politik Afghanistan, khususnya dalam pemilihan umum. Munculnya kelompok Taliban yang memiliki misi ingin memperjuangkan revolusi Islam, dan mendeklarasi misinya mengembalikan perdamaian, melucuti persenjataan masyarakat, menerapkan syariat Islam, serta mempertahankan integritas dan karakter Islam Afghanistan justru membuat situasi negara Afghanistan kacau karena beberapa kebijakan yang ditetapkan Taliban sangat ekstrim dan kaku. Pasca rezim Taliban, sistem pemerintahan Afghanistan berkembang menuju transisi demokrasi. Hal ini dapat dilihat melalui adanya beberapa partai politik yang menghiasi dalam salah satu kontestasi pemilihan umum tahun 2014.

### Daftar Rujukan

- Akhtar, N. (2008). Pakistan, Afghanistan, and The Taliban. *Source: International Journal on World Peace*, 25(4), 49–73. <https://www.jstor.org/stable/20752859?origin=JSTOR-pdf>
- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet.
- Azad, A. (n.d.). *The Beginnings of Islam in Afghanistan: Conquest, Aculturation, and Islamization* (N. Green (ed.)). University of California Press.
- Barfield, T. (2010). *Afghanistan: A Cultural and Political History*. Princeton University Press.
- Congress, L. of. (2008). *Country profile: Afghanistan*. The Library of Congress. <https://doi.org/10.1191/0969733004ne730xx>
- Cordesman, A. H., & Hwang, G. (2020). Afghan Politics: Making Peace Efforts a Self-Inflicted Wound? In *Center for Strategic and International Studies*. <http://www.jstor.org/stable/resrep24830.7>
- Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Dupree, L. (1980). *Afghanistan*. Princeton University Press.
- Ergashev, B. (2011). Afghanistan's political system: international efforts, internal resources, and untapped reserves. *Central Asia and the Caucasus*, 12(4), 73–83.
- Esposito, J. (2002). *Unholy War*. Oxford University Press.
- Fanani, A. (2013). Wajah Politik Afghanistan Era 1933-2002 dalam The Kite Runner Karya Khaled Hosseini. *Diglossia*, 5(1), 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/diglossia.v5i1.317>
- Giustozzi, A. (2013). March towards democracy? The development of political movements in Afghanistan. *Central Asian Survey*, 32(3), 318–335. <https://doi.org/10.1080/02634937.2013.835197>
- Hardiyanti, S. (2018). Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memerangi Kelompok Taliban di Afghanistan Pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009-

2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1–39. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6009>
- Ibrahimi, S. Y. (2017). The Taliban's Islamic Emirate of Afghanistan (1996–2001): 'War-Making and State-Making' as an Insurgency Strategy. *Small Wars and Insurgencies*, 28(6), 947–972. <https://doi.org/10.1080/09592318.2017.1374598>
- Ismail, S. (2006). *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism (Library of Modern Middle East Studies)*. I.B. Tauris.
- Jackson, A., & Weigand, F. (2019). The Taliban's war for legitimacy in Afghanistan. *Current History*, 118(807), 143–148. <https://doi.org/10.1525/curh.2019.118.807.143>
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khan, A. Q. (2022). Understanding Afghanistan: History, Politics, and Economy. In *A Social History of England, 1500-1750*. Routledge. <https://doi.org/10.1017/9781107300835.008>
- Khurun'in, I. (2016). Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Transformasi Global*, 3(1), 96–113. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/50>
- Larson, Anna; Coburn, N. (2014). Youth Mobilization and Political Constraints in Afghanistan: The Y Factor. In *Institute of Peace Special Report*. <https://doi.org/10.1515/9781626374843-004>
- Larson, A. (2015). *Political Parties in Afghanistan*. US Institute of Peace.
- Nafisah, D. (2019). AFGHANISTAN DI BAWAH PEMERINTAHAN TALIBAN TAHUN 1996-2001 M [UIN Sunan Ampel]. In *Thesis*. <http://digilib.uinsby.ac.id/30671/>
- Rashid, A. (2001). Taliban: Militant Islam, oil and fundamentalism in Central Asia. In *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/20049858>
- Reynolds, A., & Wilder, A. (2004). *Free, Fair or Flawed: Challenges for Legitimate Elections in Afghanistan* (Issue September 2004).
- Riaz, A. (2021). Religion and Politics in South Asia. In *Midwest Journal of Political Science* (Vol. 6, Issue 2). Routledge. <https://doi.org/10.2307/2108843>
- Runion, M. L. (2007). *The History of Afghanistan*. Green Wood Press.
- Ruttig, T. (2013). Islamists, Leftists – and a Void in the Center. Afghanistan's Political Parties and where they come from (1902-2006). *Konrad Adenauer Stiftung*, 53(9), 1689–1699. <https://www.afghanistan-analysts.org/publication/other-publications/islamists-leftists-and-a-void-in-the-center-afghanistans-political-parties-and-where-they-come-from-1902-2006-2/>
- Sharan, T., & Heathershaw, J. (2011). Identity Politics and Statebuilding in Post-Bonn Afghanistan: The 2009 Presidential Election. *Ethnopolitics*, 10(3–4), 297–319. <https://doi.org/10.1080/17449057.2011.559109>
- Sulasman. (2014). *Metode Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.

Ahmad Musta'id

Sejarah Islam dan Politik Afghanistan

Supriyadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. CV. Pustaka Setia.

Wicaksono, H. (2020). *Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika*. 8(1), 46–56.  
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v8i1.13235>